

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

Tindakan kekerasan seksual merupakan isu sosial yang kompleks dan sering kali dihadirkan dalam berbagai konteks dalam sebuah media film (Projansky & Kern, 2004, p. 95). Penggambaran kekerasan seksual dalam film tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu tersebut (Projansky & Kern, 2004, p. 95). Film seringkali menjadi bahan pemicu diskursus publik karena mampu merefleksikan masalah sosial dan budaya yang relevan sehingga mendorong penonton untuk membahas berbagai perspektif (Janney, 2012, p. 2). Penelitian yang berjudul *Performativity of Rape Culture through Fact and Fiction: An Exploration of India's Daughter and Anatomy of Violence* (Devasundaram & Barn, 2020, p. 882) menyatakan bahwa film membentuk diskursus yang lebih luas tentang kekerasan berbasis gender dan menunjukkan bagaimana media dapat berfungsi sebagai alat untuk menyuarakan ketidakadilan.

Penelitian Devasundaram & Barn (2020) mengeksplorasi dua karya yaitu film dokumenter *India's Daughter* dan film fiksi *Anatomy of Violence* yang menunjukkan dan menghasilkan budaya pemerkosaan. Selain itu, fungsi media dalam menampilkan kekerasan seksual dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang pelaku dan korban pemerkosaan (Devasundaram & Barn, 2020, p. 884). Seringkali, perempuan disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Stereotip tentang gender dan seksualitas juga memainkan peran penting dalam pembentukan cerita tentang pelaku dan korban kekerasan (Devasundaram & Barn, 2020, p. 882). Menunjukkan bahwa persepsi pelaku sebagai

akibat dari sistem patriarki yang represif dapat memungkinkan diskursus yang lebih mendalam tentang metode dasar penanganan kekerasan seksual.

Teori *performativity* Judith Butler digunakan untuk menganalisis bagaimana budaya pemerkosaan dibentuk dan dipertahankan melalui penggambaran media film (Devasundaram & Barn, 2020, p. 881). Hasil temuan menunjukkan bahwa, identitas gender dan perilaku seksual adalah hasil dari pengulangan peran dan tindakan yang dibuat oleh norma sosial daripada sesuatu yang alamiah. Meskipun demikian, salah satu kekurangan teori ini adalah tidak meninjau teori-teori lain yang relevan dengan diskusi tentang budaya pemerkosaan. Selain itu, analisis performativitas budaya pemerkosaan melalui film memerlukan pemahaman tentang bagaimana audiens menafsirkan dan merespons narasi visual tersebut (Mulvey, 2013). Namun, hanya melihat teks atau narasi film tanpa memeriksa bagaimana penonton dari berbagai latar belakang sosial dan budaya, merespons film-film tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Devasundaram & Barn (2020) tidak melihat bagaimana media sosial memperkuat atau mengubah budaya perkosaan di India. Sangat penting untuk memahami penggambaran kekerasan seksual dalam karya seperti *India's Daughter* dan *Anatomy of Violence* di era digital ini, karena penggunaan media sosial sebagai *platform* mampu untuk menyuarakan isu-isu sosial dan membentuk gerakan. Kemudian, bagaimana kedua karya tersebut dibagikan, dibahas, dan diperdebatkan di media sosial dapat menunjukkan peran teknologi dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan sosial (Papacharissi, 2015, p. 20).

Devasundaram & Barn (2020, p. 884) menjelaskan bahwa cara media visual sering kali memanipulasi penggambaran kekerasan seksual untuk membentuk diskursus publik yang dapat menyajikan narasi kekerasan seksual dalam konteks yang sensasional dan terkadang kontradiktif. Sehingga, melalui perspektif ini penelitian dapat memperdalam analisis

tentang media dalam membangun persepsi publik terkait kekerasan seksual, serta memperlihatkan bagaimana elemen-elemen sinematik berperan dalam memperkuat atau menantang budaya pemerkosaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Selain itu, sebuah penelitian dilakukan di Malaysia untuk memahami dan menafsirkan bagaimana penonton Malaysia India memahami penggambaran kekerasan seksual dalam film Tamil. Hasil temuan dari penelitian yang berjudul *Perception of sexual violence in Tamil movies by Malaysian Indian viewers* (Karupiah., et al, 2020, p. 5) menjelaskan bahwa, Penonton Malaysia India umumnya memiliki pemahaman yang jelas tentang penggambaran kekerasan seksual dalam film Tamil sebagai perilaku yang tidak dapat diterima. Mereka menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam konteks apa pun (Karupiah., et al, 2020, p. 6). Namun, dalam konteks yang lebih luas terdapat variasi dalam pemahaman penonton tentang makna dan dampak kekerasan seksual. Beberapa penonton mungkin melihatnya sebagai hiburan semata, sementara yang lain menyadari seriusnya sebagai masalah sosial. Pemahaman penonton terhadap kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis kelamin, usia, agama, dan latar belakang pendidikan mereka (Studzińska, 2015, p. 28).

Film-film Tamil sering menggambarkan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai sesuatu yang wajar (Karupiah., et al, 2020, p. 2). Pemaknaan semacam ini dapat memperkuat stereotip tentang perempuan sebagai korban yang lemah dan laki-laki sebagai pelaku yang kuat. Penting bagi penonton Malaysia India untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap penggambaran kekerasan seksual dalam film Tamil. Mereka harus menyadari bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun dan dampaknya bisa sangat merugikan bagi korban serta masyarakat pada umumnya.

Penelitian Karupiah., et al (2020) mungkin belum cukup mengeksplorasi diskursus publik dan berbagai dimensi demografi penonton, seperti usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi, dalam merespons paparan media seksual. Misalnya, remaja laki-laki dan perempuan mungkin memiliki reaksi yang berbeda terhadap konten seksual karena perbedaan dalam sosialisasi gender dan harapan sosial. Selain itu, status sosial ekonomi dapat mempengaruhi akses terhadap jenis media tertentu serta cara individu memproses dan menanggapi informasi yang mereka terima. Tanpa memperhitungkan variasi ini, hasil penelitian bisa menjadi kurang akurat dan tidak mencerminkan pengalaman yang lebih luas dari seluruh populasi.

Kurangnya perhatian terhadap variasi demografi ini juga membatasi generalisasi temuan penelitian. Hasil yang berlaku untuk satu kelompok usia, jenis kelamin, atau kelas sosial mungkin tidak relevan atau bahkan menyesatkan jika diterapkan pada kelompok lain. Misalnya, remaja dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah mungkin memiliki akses yang berbeda terhadap teknologi dan media dibandingkan dengan remaja dari keluarga yang lebih kaya, yang dapat mempengaruhi paparan dan dampak media seksual. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih sesuai mengenai dampak paparan media seksual, penelitian harus mencakup berbagai demografi penonton, memastikan bahwa temuan dapat digeneralisasi secara lebih luas dan relevan bagi berbagai kelompok masyarakat.

Di Indonesia, terdapat sebuah film yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual yaitu *Penyalin Cahaya* atau *Photocopier* (2021). Pada penelitian yang berjudul *Radical feminist representation, social cognition, and film communication on reducing sexual harassment* (Razali & Oktaviana, 2023) melihat bagaimana film *Photocopier* (2021) memiliki potensi untuk mengurangi insiden pelecehan seksual dengan menggunakan pendekatan feminis radikal, kognisi sosial, dan komunikasi

film. Kemudian, mengeksplorasi penggambaran feminis radikal dengan menyoroti pengalaman pelecehan seksual dari sudut pandang perempuan dan bagaimana mereka melawannya. Dengan menampilkan narasi yang dipimpin oleh perempuan, berpotensi meningkatkan kesadaran tentang masalah pelecehan seksual dan memberdayakan perempuan untuk bertindak dalam menghadapinya.

Selain itu, juga mengadopsi pendekatan kognisi sosial dengan memperlihatkan bagaimana pelecehan seksual terjadi dan dampaknya terhadap korban secara emosional dan psikologis. Melalui penceritaan yang mendalam tentang pengalaman korban, dapat membantu penonton memahami perspektif korban dan meningkatkan empati terhadap mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong tindakan untuk mencegah pelecehan seksual. Sehingga membuat pesan yang disampaikan oleh film lebih mudah dipahami dan diingat oleh penonton dan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah pelecehan seksual.

Selain itu, dengan memberikan perspektif tentang bagaimana penggambaran feminis radikal dalam film dapat memengaruhi cara orang berpikir dan melihat kekerasan seksual. Sehingga, dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana film sebagai media komunikasi dapat membentuk diskusi publik yang kritis tentang norma-norma patriarkal, mendekonstruksi stereotip gender dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual. Penelitian ini dapat membantu merumuskan argumen tentang film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) dalam menciptakan diskursus yang lebih progresif dan memberdayakan terkait isu kekerasan seksual dengan memahami efek sosial kognitif dari representasi feminis dalam media.

Namun, penelitian hanya berfokus pada penggambaran feminisme radikal tertentu dalam film yang dianalisis. Pemahaman tentang berbagai bentuk feminisme yang disajikan dan diterima oleh audiens menjadi terbatas. Penggambaran feminisme radikal dalam film

dapat memberikan wawasan berharga tentang perjuangan melawan patriarki dan ketidakadilan gender, tetapi juga penting untuk mengkaji bagaimana ide-ide dari aliran feminisme lain dimunculkan dalam media populer dan dampaknya terhadap audiens. Penelitian ini juga tidak melihat respon penonton terhadap penggambaran pelecehan seksual melalui film tersebut. Dengan memperluas penelitian untuk mencakup beragam penggambaran feminisme dan melihat respon publik, akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana film mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap isu-isu gender di masyarakat yang lebih luas.

Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memahami persepsi publik terhadap penggambaran kekerasan seksual dalam film, peran narasi film dalam membentuk kesadaran sosial, dan bagaimana media mereproduksi budaya pemerkosaan. Sehingga, peneliti memilih ketiga penelitian tersebut untuk tinjauan pustaka, peneliti terdorong untuk memperluas pemahaman guna melengkapi celah pengetahuan yang ada dan mengatasi kelemahan yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya terkait dengan diskursus publik, terutama dalam konteks media film. Penelitian ini secara khusus akan berfokus pada dinamika diskursus publik terhadap penggambaran kekerasan seksual dalam sebuah karya film.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Diskursus Publik

Diskursus publik adalah salah satu teori komunikasi dan masyarakat dari filsuf dan sosiolog Jerman Jurgen Habermas. Menurut Habermas (1989, p. 35) menyatakan bahwa, diskursus publik adalah proses pertimbangan rasional di ruang publik di mana semua orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat terbuka tentang masalah yang relevan dengan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini berasal dari tradisi Pencerahan, yang menekankan betapa

pentingnya berdebat dan berpikir kritis untuk membuat keputusan kolektif yang sah (Habermas, 1989, p. 64).

Diskursus tidak hanya menggambarkan dunia, tetapi juga mempengaruhi cara individu melihat, merasa, dan bertindak di dalamnya. Mencakup bahasa, tindakan, dan struktur sosial yang membentuk cara manusia memahami, menginterpretasikan, dan berkomunikasi tentang dunia. Habermas (1989, p. 211) berasumsi bahwa ruang publik sebagai sarana demokrasi di mana diskusi berlangsung secara bebas dan tanpa batasan. Sehingga dapat menjadi kontrol demokratis terhadap kekuasaan. Selanjutnya, asumsi dari teori diskursus publik ini adalah tujuan diskursus untuk mencapai kesepakatan bersama (Habermas, 1989, p. 214). Ada 6 konsep utama untuk memahami teori diskursus menurut Habermas (1989):

1). Ruang Publik

Menurut Jürgen Habermas (1989, p. 218) ruang publik adalah tempat di mana orang dapat berkumpul dan berbicara secara bebas tentang masalah sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi masyarakat. Ruang publik memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam proses demokratis dan mempengaruhi kebijakan publik (Habermas, 1989, p. 211). Ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai tempat diskusi tetapi juga sebagai produk sosial yang dibentuk oleh kebiasaan sehari-hari (Lefebvre, 2012, p. 82). Ruang publik yang ideal sebagai ruang yang terbuka, bebas dari dominasi politik, ekonomi dan rasionalitas digunakan untuk berbicara daripada kekuasaan (Habermas, 1989, p. 128). Semua orang harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam diskusi yang demokratis di ruang publik.

Namun, menurut Fraser (2014, p. 91) ruang publik sering kali menunjukkan hierarki kekuasaan di mana perempuan dan minoritas diisolasi

secara sistematis. Ruang publik memiliki peran penting dalam proses demokrasi karena memungkinkan warga negara untuk melihat kekuasaan negara dan kapital dan membentuk opini publik yang independen. Namun, Habermas (1989, p. 212) menjelaskan bahwa dominasi dan komersialisasi media massa telah merusak ruang publik. Media massa memainkan peran penting dalam membentuk ruang publik karena tidak hanya menyebarkan informasi tetapi juga menentukan masalah mana yang pantas mendapat perhatian publik (Adut, 2013, p. 253).

Kontroversi yang berkembang pada sebuah fenomena juga memengaruhi dinamika ruang publik (Adut, 2013, p. 253). Kontroversi sering menarik perhatian publik dan berpotensi memicu perubahan sosial. Selain kontroversi, seiring kemajuan teknologi juga merubah cara masyarakat untuk berdiskusi. Menurut Fuchs (2015, p. 73) menyatakan bahwa digitalisasi media, terutama melalui pertumbuhan internet dan media sosial dapat mengubah dinamika ruang publik.

Fuchs (2015, p. 68) juga menjelaskan bahwa, data pengguna biasanya dikumpulkan oleh *platform* media sosial yang memiliki tujuan komersial. Perusahaan teknologi dapat menggunakan algoritma untuk memanipulasi informasi yang dilihat pengguna dan dapat mempengaruhi perspektif sosial mereka. Algoritma biasanya dirancang untuk memprioritaskan konten yang paling emosional atau kontroversial yang dapat menyebabkan polarisasi politik dan sosial di ruang publik digital (Fuchs, 2015, p. 89).

2). Tindakan Komunikatif

Tindakan komunikatif (*communicative action*) merupakan dasar teori dari diskursus publik (Habermas, 1984). Orang-orang yang terlibat dalam

diskusi tidak hanya bertindak untuk mencapai tujuan pribadi mereka tetapi juga membantu satu sama lain untuk memahami sesuatu melalui diskusi terbuka dan argumen logis. Tindakan komunikatif adalah upaya bersama untuk mencapai tujuan melalui pengujian kebenaran, norma sosial, dan kesahihan argumen (Habermas, 1984). Dialog yang terbuka dan rasional masih menjadi kunci untuk mencapai pemahaman bersama dan mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis serta inklusif (Habermas, 1984).

Menurut Habermas (1984) mengatakan bahwa, komunikasi yang ideal terjadi ketika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, berargumentasi dan mempertanyakan keyakinan lawan bicara. Namun, dalam praktiknya untuk mencapai situasi ideal dalam diskursus publik ini sulit karena ketimpangan kekuasaan, kendala struktural dan bias ideologis yang sering mengganggu proses diskursus (Adut, 2013).

3). Diskursus Rasional

Rasionalitas adalah komponen penting dalam konsep tindakan komunikatif. Habermas (1984) membedakan rasionalitas menjadi dua yaitu instrumental dan komunikatif. Rasionalitas instrumental mengacu pada tindakan yang diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu secara efisien, terukur, dan dapat diprediksi (Habermas, 1984). Jenis rasionalitas yang mendominasi dalam sistem kapitalisme dan birokrasi modern di mana fokusnya adalah pada hasil yang dapat diukur dan dikendalikan (Habermas, 1984). Sebaliknya, rasionalitas komunikatif muncul dalam interaksi sosial, di mana tujuan utamanya adalah mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama daripada mencapai hasil tertentu (Habermas, 1984).

4). *Ideal Speech Situation*

Konsep ini mengacu pada kondisi komunikasi yang memungkinkan setiap peserta diskusi berpartisipasi secara setara dan bebas dari tekanan atau dominasi (Habermas, 1984). Dalam situasi seperti itu, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk berbicara, mengemukakan pendapat, mempertanyakan argumen, dan mengajukan klaim kebenaran. Komunikasi yang berlangsung harus didasarkan pada argumen rasional dan terbuka bukan pada manipulasi, ancaman, atau kekuasaan yang tidak setara (Habermas, 1984).

5). Dominasi

Konsep yang mencerminkan ketimpangan dalam akses dan pengaruh terhadap proses komunikasi di ruang publik (Habermas, 1989, p. 130). Dominasi muncul ketika individu atau kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, sosial atau politik memanfaatkan posisi mereka untuk memengaruhi diskursus secara tidak adil dan menghalangi partisipasi kelompok marginal atau mendistorsi informasi (Habermas, 1989, p. 130). Dominasi menjadi penghalang terciptanya diskursus yang rasional dan setara.

6). Konsensus

Konsensus adalah inti dari teori diskursus publik yang berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama melalui komunikasi rasional (Habermas, 1989, p. 195). Menurut Habermas (1989, p. 195) menyatakan bahwa, konsensus tidak didasarkan pada kekuasaan, paksaan atau dominasi, tapi berdasarkan pada argumentasi rasional yang memungkinkan setiap pihak terlibat dalam diskusi dengan cara yang sama. Proses ini terjadi di

ruang publik yang ideal di mana tidak ada tekanan dari luar sehingga setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berbicara, berdebat, dan mengkritik.

Konsensus bisa tercapai ketika semua partisipan menerima suatu keputusan atau pandangan karena mereka merasa secara rasional dapat menerimanya bukan karena adanya tekanan atau otoritas eksternal (Habermas, 1989, p. 179). Dalam proses diskursus, argumen yang terbaik (bukan didominasi oleh kekuasaan) akan muncul sebagai dasar konsensus. Habermas (1989, p. 195) melihat konsensus sebagai proses dinamis yang terus berkembang dapat mencerminkan perubahan nilai, norma, dan pandangan masyarakat secara kolektif.

Habermas (1989, p. 176) mengatakan bahwa, diskursus terdiri dari berbagai tahap yang saling terkait. Pertama, partisipasi terbuka yang berarti setiap orang yang berada di ruang publik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi dengan memberikan pendapat mereka, mempertanyakan pendapat orang lain dan berdebat. Selanjutnya, diskusi harus berfokus pada argumentasi rasional di mana masyarakat menggunakan argumen yang masuk akal untuk mendukung pendapat mereka. Selain itu, Habermas (1989, p. 178) menekankan pengujian klaim validitas. Klaim validitas terdiri dari tiga jenis yaitu kebenaran (*truth*), ketepatan normatif (*normative rightness*), dan ketulusan (*sincerity*). Semua klaim yang diajukan dalam diskusi diuji menggunakan ketiga kriteria ini. Tujuan diskusi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dicapai melalui proses diskusi terbuka dan rasional yang tidak dipaksakan atau didasarkan pada kepentingan sepihak.

2.2.2. Diskursus dalam Media Sosial

Media sosial adalah *platform* berbasis internet yang memungkinkan orang berinteraksi, menampilkan diri dan berbagi konten. Dapat dilakukan baik dalam kelompok kecil maupun besar, interaksi ini dapat terjadi secara langsung atau dengan jeda waktu (Carr & Hayes, 2015, p. 46). Media sosial tidak hanya sebagai *platform* untuk berbagi konten, tetapi juga sebagai sarana bagi pengguna untuk membentuk identitas diri dan berinteraksi dengan orang lain (Carr & Hayes, 2015, p. 47).

Diskursus sangat penting dalam komunikasi, terutama di media sosial (Ilbury, 2022). Diskursus berkembang menjadi tempat di mana orang berbicara, berdebat, dan berbagi ide, bukan hanya sebagai alat yang memungkinkan orang berinteraksi dan berkomunikasi (Kuncoro., et al, 2023, p. 19). Sehingga, mempengaruhi cara individu berinteraksi terutama di situs web seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan *TikTok*.

Diskursus mengatur cara individu berbicara dan orang lain melihat individu tersebut (Kuncoro., et al, 2023, p. 20). Karena sifatnya yang selalu berubah, *platform* ini mendorong diskusi secara *real time*, yang memberikan rasa keberlanjutan yang tidak ada di media konvensional. Selain itu, diskursus yang ditampilkan melalui teks, emoji, *hashtag* dan meme, memungkinkan individu untuk menyampaikan pikiran dan emosi yang rumit dalam ekspresi yang berbeda. Makna dan realitas sosial kita sangat dibentuk oleh percakapan (Kuncoro., et al, 2023, p. 20).

Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan *TikTok* telah mengubah cara individu berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia. Dengan menggunakan *platform* ini, orang dapat mengungkapkan pendapat mereka, berpartisipasi dalam diskusi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan membentuk komunitas *online* yang berbagi nilai dan semangat (Kuncoro., et al, 2023, p. 21). Menurut Ilbury (2022) diskusi di *platform* ini sangat penting untuk membentuk cara individu melihat berbagai masalah sosial, yang menghasilkan rasa inklusif.

Fuchs (2021) menyatakan bahwa, meskipun *platform* media sosial memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi, faktanya masyarakat menunjukkan situasi yang berbeda. Banyak pengguna media sosial menjadi konsumen pasif, mengorbankan yang lain yang dapat mempengaruhi pendapat publik. Selain itu, ada kekhawatiran terus-menerus tentang algoritma yang dapat memperkuat bias dengan mengkurasi konten berdasarkan perilaku pengguna sebelumnya, yang semakin membatasi pandangan yang berbeda (Wasike, 2013, p. 16).

2.2.3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan yang melibatkan perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau melanggar kehendak pihak lain (WHO, 2012). Pemaksaan seksual, pelecehan seksual, perundungan seksual, atau eksploitasi seksual adalah beberapa contoh tindakan kekerasan seksual, yang dapat menyebabkan trauma fisik, psikologis, atau emosional pada korban. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan kekerasan seksual sebagai berbagai jenis perilaku seksual yang tidak diinginkan, termasuk sentuhan fisik yang tidak diinginkan, pemaksaan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual anak (WHO, 2012). Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam hubungan intim, tempat kerja, sekolah, atau ruang publik. Seringkali disertai dengan pelanggaran kekuasaan yang digunakan untuk mengontrol, mendominasi, dan merendahkan korban (WHO, 2012).

Jenis Kekerasan	Deskripsi	Contoh
Kekerasan Seksual secara Verbal	Kekerasan seksual yang terjadi melalui kata-kata, ungkapan, atau komunikasi lisan yang merendahkan,	- Kata-kata kasar atau hinaan terhadap korban - Penggunaan bahasa yang merendahkan atau mempermalukan - Ancaman verbal terkait dengan kekerasan seksual

	mengancam atau mengintimidasi korban.	
Kekerasan Seksual secara Fisik	Kekerasan seksual yang melibatkan tindakan fisik atau sentuhan yang tidak diinginkan, seperti pemaksaan hubungan seksual, pelecehan fisik atau pemerkosaan.	- Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan - Sentuhan yang tidak diinginkan - Penyerangan fisik atau kekerasan yang bertujuan untuk menindas dan melecehkan korban

Tabel 1. Jenis Kekerasan Seksual Verbal dan Fisik menurut WHO (2012)

Dalam konteks komunikasi, kekerasan seksual bisa diartikan sebagai segala bentuk perilaku yang memaksa atau melecehkan secara seksual baik secara verbal, non-verbal, tertulis, maupun digital (Medvi & Sahminan, 2024, p. 89). Selain terjadi secara langsung, tindakan kekerasan seksual dapat diperkuat melalui media sosial dan pemberitaan seperti ujaran kebencian, komentar seksual atau objektifisasi korban dalam wacana publik. Selain itu, faktor utama dalam kekerasan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan dan tekanan psikologis (Medvi & Sahminan, 2024, p. 91).

Kekerasan seksual merupakan masalah besar yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang serta struktur sosial dan budaya masyarakat (Komnas Perempuan, 2021). Salah satu cara untuk memahami masalah ini adalah melalui penggambaran kekerasan seksual dalam media, khususnya film. Film memiliki peran yang signifikan dalam membentuk persepsi publik tentang berbagai masalah, termasuk kekerasan seksual. Penggambaran kekerasan seksual dalam film tidak hanya berfungsi sebagai gambaran realitas tetapi juga dapat membentuk cara masyarakat melihat dan memperkuat tanggapan mereka tentang kekerasan seksual.

Konsep-konsep kekerasan seksual yang dapat digunakan untuk menganalisis penggambaran kekerasan seksual pada film dan diskursus publik di media sosial sebagai berikut:

1. *Rape Culture*

Konsep ini merujuk pada lingkungan sosial yang memungkinkan atau mendukung kekerasan seksual dengan mengabaikan, membenarkan, atau menganggap remeh perilaku tersebut. Konsep ini juga menyebarkan perilaku yang merendahkan perempuan dan individu yang rentan. Serta menyebarkan ideologi bahwa kekerasan seksual adalah sesuatu yang dapat diterima atau tidak terlalu serius (Powell & Henry, 2017, p. 90).

2. *Victim Blaming*

Victim blaming merujuk pada sikap atau pola pikir yang menyalahkan korban kekerasan seksual atas peristiwa yang menimpanya (Adolfsson, 2018, p. 6). Hal ini bisa berupa mempertanyakan perilaku atau pilihan hidup korban, serta menganggap bahwa korban memiliki tanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya (Adolfsson, 2018, p. 20). Misalnya, menyalahkan korban karena pakaian yang dikenakan, perilaku mereka atau keadaan yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Pemikiran semacam ini sering muncul dalam diskursus sosial yang memperkuat stigma terhadap korban dan mengabaikan tindakan pelaku (Adolfsson, 2018, p. 22).

3. *Gender power*

Kekuasaan gender sering kali dimainkan oleh pelaku yang menggunakan dominasi fisik, sosial dan psikologis terhadap korban kekerasan seksual, yang biasanya perempuan (Foucault, 2019). Kekerasan seksual bukan hanya merupakan tindakan fisik tetapi juga merupakan

manifestasi dari struktur ketidaksetaraan gender yang sudah terinternalisasi dalam masyarakat (Bourdieu, 2016). Media, budaya dan norma sosial berperan dalam mereproduksi wacana yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan baik secara eksplisit maupun implisit (Bourdieu, 2016).

Kekuasaan ini tidak hanya dilihat dalam bentuk tindakan kekerasan, tetapi juga melalui kontrol terhadap narasi, identitas, dan posisi perempuan dalam masyarakat yang menghalangi mereka untuk melawan atau mengungkapkan pengalaman mereka. Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi dari ketidaksetaraan kekuasaan yang mengakar dalam struktur sosial dan budaya di mana gender sering kali menentukan siapa yang memiliki kekuasaan dan siapa yang menjadi korban (Butler, 2022).

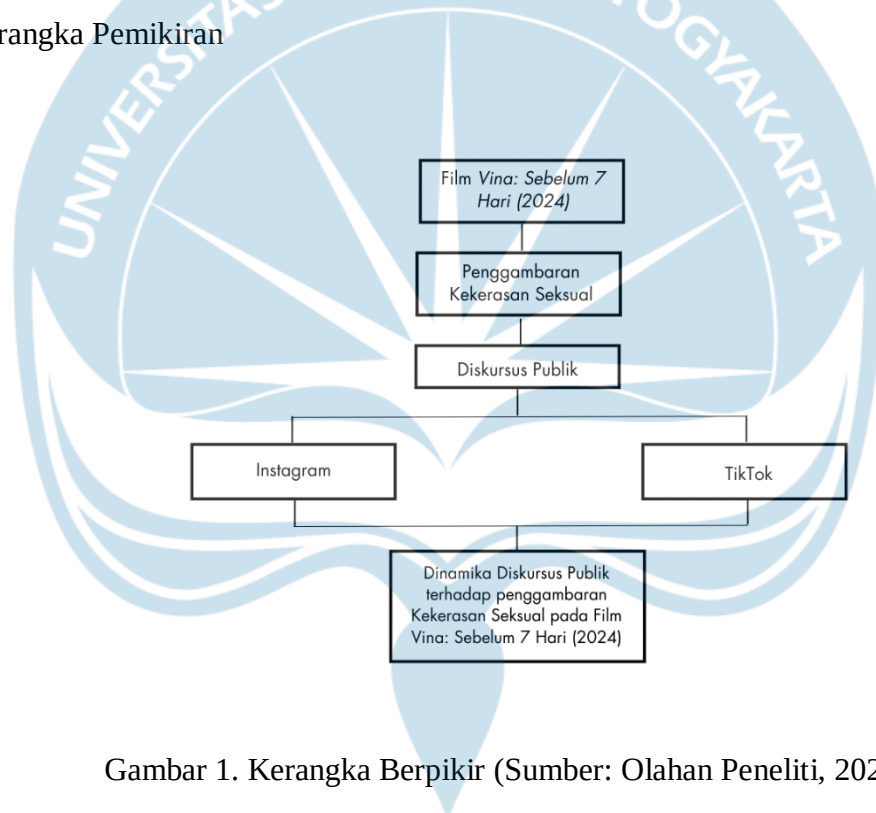
4. *Objectification*

Objectification merujuk pada proses di mana individu dipandang dan diperlakukan semata-mata sebagai objek yang dapat dimiliki atau dieksploitasi tanpa memperhitungkan kemanusiaan atau martabat mereka (Vance, et al., 2015). *Objectification* ini dapat mengarah pada tindakan eksploitasi seksual di mana korban dilihat hanya sebagai sarana untuk memenuhi keinginan seksual pelaku, bukannya sebagai individu dengan hak dan kehendak yang harus dihormati (Vance, et al., 2015). *Objectification* berperan penting dalam membentuk dan memperkuat budaya kekerasan seksual, karena menciptakan norma sosial yang membenarkan atau bahkan meremehkan perilaku kekerasan terhadap tubuh dan hak-hak orang lain (Pecini., et al, 2023).

5. *Consent* (Persetujuan)

Consent (Persetujuan) adalah pengakuan sukarela dan sadar dari seseorang untuk terlibat dalam suatu tindakan seksual (Popova, 2019, p. 150). Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan, manipulasi, atau ketakutan. Konsep ini menekankan bahwa seseorang dapat menarik persetujuannya kapan saja dan tidak memberikan persetujuan di awal tidak berarti persetujuan terus-menerus (Popova, 2019, p. 151). Kondisi dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual jika tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dan tegas dari pihak yang terlibat.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Berpikir (Sumber: Olahan Peneliti, 2024)

Kerangka pemikiran penelitian ini berfokus pada bagaimana penggambaran kekerasan seksual dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) membentuk dinamika diskursus publik di media sosial khususnya pada *platform* Instagram dan TikTok. Film ini menjadi medium komunikasi visual yang tidak hanya menyajikan narasi tetapi juga mengangkat isu sensitif seperti kekerasan

seksual, yang melibatkan konsep-konsep seperti *rape culture*, *victim blaming*, *consent*, *gender power*, *objectification* serta bentuk kekerasan seksual baik verbal maupun fisik. Penggambaran ini menciptakan penggambaran yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat mengenai isu tersebut.

Melalui teori diskursus publik dari Habermas (1989) penelitian ini menganalisis bagaimana isu-isu tersebut didiskusikan dan diperdebatkan di ruang publik digital. Habermas (1989) menekankan bahwa diskursus publik adalah arena tempat individu dan kelompok berbagi pandangan untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam konteks media sosial, ruang ini menjadi lebih dinamis dengan kehadiran berbagai pihak yang memberikan respons, baik berupa dukungan, kritik, maupun debat terhadap isu yang diangkat oleh film. Media sosial seperti Instagram dan TikTok menjadi ruang di mana masyarakat mengartikulasikan opini, berbagi pengalaman pribadi, dan menciptakan narasi-narasi baru terkait kekerasan seksual.

Dalam kerangka ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) memicu percakapan publik yang kompleks termasuk bagaimana elemen-elemen tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan diperdebatkan oleh audiens di media sosial. Penelitian juga mengeksplorasi bagaimana diskursus yang muncul mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas mengenai isu kekerasan seksual di masyarakat.